Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur Dan Kota Langsa)

Puti Andiny[1] , Nursani Adelida[2], Rahmi Meutia[3]
Fakultas Ekonomi Universitas Samudra
[1]***email***: putiandiny@unsam.ac.id
[2]***email***: nursani@gmail.com
[3]***email***: rahmi.meutia@unsam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pembangunan regional antar Kabupaten/Kota (studi kasus Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pendapatan perkapita dan jumlah penduduk selama tahun 2008-2017. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Entropi Theil, secara rata-rata nilai Indeks Entropi Theil Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2008-2017 yaitu sebesar 0,729. Nilai Indeks Entropi Theil Kota Langsa selama tahun 2008-2017 secara rata-rata yaitu sebesar 1,310. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa masih jauh dari kata baik dari sisi pembangunan yang dibuktikan dengan nilai Indeks Entropi Theil yang nilainya masih jauh dari angka 0. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor lain seperti meningkatnya jumlah penduduk namun lapangan usaha yang tersedia masih kurang memadai, sehingga rendahnya angka pendapatan masyarakat akan mempengaruhi ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, pengelolaan tingkat kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, lancarnya mobilitas barang dan jasa dan lain sebagainya dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.

Kata Kunci**:** *Entropi theil, PDRB Perkapita, Jumlah penduduk*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya dibidang perkonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu dengan menghitung faktor perubahan harga (inflasi) dan menggunakan faktor pengali harga konstan sehingga diperoleh gambaran peningkatan produksi secara makro. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat. Dimana kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan per kapita masyarakat tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak.

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional yang mana pembangunan masing-masing daerah telah menghasilkan pencapaian yang berbeda-beda. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sementara daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat.

Perbedaan tingkat pembangunan inilah yang akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketimpangan regional daerah semakin besar. Berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar daerah maju dan daerah terbelakang.

Masalah ketimpangan dan tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negaranegara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu penghapusan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi mutlak diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah tidak secara aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar dan kemudian memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya jurang kesejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin sebagai akibat dari kegiatan ekonomi daerah kaya lebih lancar dibandingkan dengan daerah miskin.

Salah satu cara mengurangi ketimpangan suatu daerah yaitu dengan maka investasi harus lebih banyak diarahkan kepada proyek-proyek yang ada hubungannya dengan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian dan sebagainya sehingga ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar. Selain itu, pemekaran suatu daerah induk menjadi sebuah cara untuk memaksimalkan sumber daya yang ada guna mengoptimalkan pembangunan yang ada di suatu daerah.

Menurut Sjafrizal (2008:2), motivasi suatu daerah memekarkan diri adalah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Akan tetapi, seringkali motivasi pemekaran daerah juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Salah satu faktor pendorong mengapa pemerintah lokal melihat kesempatan besar dengan adanya pemekaran daerah adalah secara materil, dengan adanya pembentukan kabupaten dan provinsi baru maka daerah-daerah tersebut akan menerima suntikan dana pembangunan yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Dalam aspek pengembangan wilayah, pelaksanaan pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah induk dan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah. Hal ini dikarekan oleh adanya perbedaan sumber daya yang digunakan dalam proses pembangunan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran daerah. Adakalanya pemekaran daerah menyebabkan kegiatan perekonomian daerah induk menurun drastis karena sebagian potensi daerahnya berada di daerah otonom baru.

Kabupaten Aceh Timur merupakan sebuah Kabupaten Induk yang telah melakukan pemekaran. Salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa yang diresmikan pada tahun 2001 dan menjadi satu-satunya daerah Kota Madya disamping Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Sebagai daerah dengan luas daerah terkecil, Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang paling maju dikarenakan sebelum pemekaran Kota Langsa adalah Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan Aceh Timur saat ini adalah Kabupaten dengan luas daerah terbesar di provinsi Aceh setelah pemekaran.

Pembangunan ekonomi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pemerintah berupaya memanfaatkan berbagai sektor yang ada untuk memperoleh nilai tambah ekonomi bagi daerah tersebut. Dalam meningkatkan pembangunan, Kabupaten Aceh Timur memanfaatkan sektor jasa dan pertanian sebagai sektor unggulan, sedangkan Kota Langsa memprioritaskan sektor jasa, pendidikan dan pariwisata dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah juga dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan yang ada di wilayah tersebut.

Ketimpangan daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk dan pendapatan perkapita di daerah tersebut. Berikut adalah jumlah penduduk dan PDRB perkapita pada

kabupaten induk yaitu Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

Jumlah penduduk dan PDRB perkapita di Kabupaten Aceh Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Perkembangan (%)
2013	386.212	-	15.729.806	-
2014	394.933	2,26	15.834.274	0,66
2015	402.976	2,04	16.251.471	2,63
2016	411.279	2,06	16.597.922	2,13
2017	419.594	2,02	16.924.865	1,97

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Timur, 2019

Berdasarkan Tabel I menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur pada Tahun 2013 yaitu sebesar 386.212 Jiwa. Kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 2,26% menjadi 394.933 Jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terus meningkat ditahun berikutnya sampai tahun 2017 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebesar 419.594 jiwa atau meningkat sebesar 2,02%. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur juga diikuti oleh peningkatan PDRB perkapita. Pada tahun 2013 PDRB perkapita diperoleh sebesar Rp. 15.729.806. Kemudian terjadi peningkatan PDRB perkapita ditahun berikutnya sebesar 0,66% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 angka yang dicapai yaitu sebesar Rp. 16.924.865 atau meningkat sebesar 1,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pada Kabupaten Aceh Timur, jumlah penduduk searah dengan PDRB per kapita dimana semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula PDRB perkapita yang diperoleh. Hal ini dikarenakan meningkatnya angka kelahiran disetiap Kecamatan dan pesatnya pertumbuhan pendapatan dari sektor pertanian dan penambahan unit pengolahan industri yang mencapai 43,37%.

Selanjutnya jumlah penduduk dan PDRB perkapita pada daerah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Timur yaitu kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita di Kota Langsa Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Perkembangan (%)
2013	159.761	-	18.662.453	-
2014	162.814	1,91	19.088.169	2,28
2015	165.890	1,89	19.559.176	2,47
2016	168.820	1,77	20.088.791	2,71
2017	171.574	1,63	20.649.312	2,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, 2019

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan jumlah penduduk di Kota Langsa pada Tahun 2013 yaitu sebesar 159.761 Jiwa. Kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,91% menjadi 162.814 Jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terus meningkat ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,89% dan di tahun 2016 sebesar 1,77%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Langsa kembali mengalami peningkatan sebesar 1,63%, tercatat jumlah penduduk di Kota Langsa pada tahun 2017

yaitu sebesar 171.574 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Langsa juga diikuti oleh peningkatan PBRB perkapita. Pada tahun 2013 PDRB perkapita diperoleh sebesar Rp.18.662.453. Kemudian terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 2,28% ditahun berikutnya dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 angka yang dicapai yaitu sebesar Rp. 20.649.312 atau meningkat sebesar 2,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pada Kota Langsa, jumlah penduduk searah dengan PDRB perkapita dimana semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula PDRB perkapita yang diperoleh. Hal ini dikarenakan terjadi pertambahan penduduk yang tinggi di Kecamatan Langsa Baro dan meningkatnya pendapatan dari Sektor Perdagangan mencapai 31%.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)	PDRB Perkapita (Rupiah)	Perkembangan (%)
2013	4.811.133	-	20.412.217,1	-
2014	4.906.835	1,99	20.819.335,9	1,99
2015	5.001.953	1,94	21.296.254,6	2,29
2016	5.096.248	1,89	21.795.866,7	2,35
2017	5.189.466	1,83	22.291.431,4	2,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2019

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Aceh pada tahun 2013 yaitu sebesar 4.811.133 Jiwa. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,99% menjadi 4.906.835 Jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terus meningkat ditahun berikutnya yaitu sebesar 1,94% pada tahun 2015 dan di tahun 2016 sebesar 1,89%. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan sebesar 1,83%, tercatat jumlah penduduk di Provinsi Aceh pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.189.466 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Aceh juga diikuti oleh peningkatan PBRB perkapita. Pada tahun 2013 PDRB perkapita diperoleh sebesar Rp.20.412.217,1. Kemudian terjadi peningkatan PDRB perkapita sebesar 1,99% ditahun berikutnya dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 angka yang dicapai yaitu sebesar Rp. 22.291.431,4 atau meningkat sebesar 2,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pada Provinsi Aceh, jumlah penduduk searah dengan PDRB perkapita dimana semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula PDRB perkapita yang diperoleh. Hal ini dikarenakan terjadi pertambahan penduduk yang tinggi di beberapa kabupaten dan Meningkatnya pendapatan dari Sektor Perdagangan mencapai 32,7%.

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Ketimpangan Pendapatan Regional

Menurut Sukirno (2006:123), ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tesebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya. Hirschman dalam Sukirno (2006:124) mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain.

Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas balik (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi pengkutuban (*polarization effects*). Selanjutnya Ardani (dalam Kuncoro, 2004:126) mengatakan kesenjangan/ ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Menurut Sjafrizal (2008:17), ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah, antar lain yaitu

1. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam
   Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaanyang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.
2. Perbedaan Kondisi Demografis
   Faktor lainnya yang juga mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan stuktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada aerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung empunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong eningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan menjadi lebih rendah.
3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan atar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan elebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Sehingga akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.
4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah.
   Terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat

konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kosentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena adanya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu. Kedua, meratanya fastilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi kosentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkosentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah.
   Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan kedaerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang anatara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi dan dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

PDRB Perkapita

Menurut Tarigan (2007:21) pendapatan perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Tetapi angka ini sering kali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan perkapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan.

Sedangkan Menurut Jhingan (2007:46), Pendapatan perkapita adalah hasil bagi antara pendapatan regional atas dasar harga konstan (ADHK) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Prediksi jumlah penduduk yang akan datang dapat bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dasar penduduk, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang pemenuhan kebutuhan akan lahan misalnya penggunaan lahan (BPS Indonesia, 2015).

Sedangkan menurut Mantra (2009:43), Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Menurut Kuncoro (2009:145), data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka). Data kuantitatif yang digunakan adalah data PDRB per kapita, jumlah penduduk Kota Langsa dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh timur yang diperoleh dari BPS Kota Langsa, BPS Aceh Timur dan BPS Aceh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2014:137), sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui internet, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini seperti data PDRB per kapita, jumlah

penduduk Kota Langsa dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh timur yang diperoleh dari BPS Kota Langsa, BPS Aceh Timur dan BPS Aceh.

Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu dan berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014:240). Data yang digunakan dalam teknik dokumentasi ini berupa gambaran umum Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan data PDRB dan Jumlah Penduduk Kota Langsa dan Aceh Timur tahun 2008-2017 yang diperoleh dari BPS Kota Langsa, BPS Kabupaten Aceh Timur dan BPS Aceh.
2. Tinjauan pustaka (*survei literatur*) adalah identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis (Kuncoro, 2009:34). Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Indeks Entropi Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Data yang diperlukan dalam analisis Indeks Theil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah.

Indeks Entropi Theil digunakan ntuk melihat arah ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di suatu daerah. dengan formula sebagai berikut (Kuncoro, 2004:68) :

$$\mathbf{Td = \Sigma\ (Yj/Y)\ log\ \{(\ Yj/Y)\ /\ (Xj/X)\}}$$

Dimana :

Td : Indeks Entropi Theil
Y_j : PDRB per kapita Kabupaten/Kota
Y : PDRB per kapita Provinsi
X_j : Jumlah Penduduk Kab/Kota
X : Jumlah Penduduk Provinsi

Pembangunan wilayah dinilai merata jika nilai indeks theil sama dengan nol atau mendekati angka nol. Demikian pula sebaliknya, ketimpangan pembangunan akan tidak merata jika nilai koefisien semakin menjauhi nol atau dengan kata lain Apabila Indeks Theil mendekati 1 maka terjadi ketimpangan yang semakin besar dan apabila Indeks Theil mendekati 0 maka ketimpangan semakin mengecil atau semakin rata.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur

Ketimpangan pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui ketimpangan pendapatan yang ada di wilayah tersebut. Untuk menghitung ketimpangan pendapatan digunakan Indeks Entropi Theil Pembangunan wilayah dinilai merata jika nilai indeks theil sama dengan nol atau mendekati angka nol. Demikian pula sebaliknya, ketimpangan pembangunan semakin tidak merata jika nilai Indeks Entropi Theil semakin menjauhi nol.

Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008–2017

Tahun	Indeks Entropi Theil	Perkembangan (%)
2008	0,738	-
2009	0,570	-22,76
2010	0,749	31,40
2011	0,754	0,67
2012	0,749	-0,66
2013	0,757	1,07
2014	0,742	-1,98
2015	0,745	0,40
2016	0,742	-0,40
2017	0,739	-0,40

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasasarkan tabel 4 dapaat diketahui bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan pembangunan dengan adanya penurunan nilai

Indeks Entropi Theil sebesar 22,76% atau 0,570. Hal ini menunjukkan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur semakin merata dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 dan 2011 kembali terjadi peningkatan nilai Indeks Entropi Theil yaitu sebesar 31,40% dan 0,67%. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur semakin tinggi atau terjadi ketidakmerataan pendapatan di wilayah tersebut.

Nilai Indeks Entropy Theil terus berfluktuasi selama tahun 2012-2015. Pada tahun 2012 nilai Indeks Entropi Theil yaitu sebesar 0,749 atau turun sebesar 0,66%, dan pada tahun 2013 Indeks Entropi Theil diperoleh sebesar 0,757 atau meningkat sebesar 1,07%. Pada tahun 2014, nilai Indeks Entropi Theil diperoleh sebesar 0,742 ayau menurun sebesar 1,98%. Kemudian pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan sebesar 0,40% atau dengan nilai Indeks Entropi Theil sebesar 0,745. Pada tahun 2016 dan 2017 nilai Indeks Entropi Theil mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,40% sehingga nilai Indeks Entropi Theil pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,739. Ketimpangan pembangunan yang diukur dengan Indeks Entropi Theil di Kabupaten Aceh timur dengan tingkat ketimpangan terendah yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,570, ini menunjukkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur masih jauh dari kata merata atau angka yang diperoleh tidak mendekati angka 0.

Ketimpangan Pembangunan Kota Langsa

Ketimpangan pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui ketimpangan pendapatan yang ada di wilayah tersebut. Untuk menghitung ketimpangan pendapatan digunakan Indeks Entropi Theil. Pembangunan wilayah dinilai merata jika nilai indeks theil sama dengan nol atau mendekati angka nol. Demikian pula sebaliknya, ketimpangan pembangunan akan tidak merata jika nilai koefisien semakin menjauhi nol.

Ketimpangan pembangunan di Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Ketimpangan Pembangunan Kota Langsa Tahun 2008–2017

Tahun	Indeks Entropi Theil	Perkembangan (%)
2008	1,366	-
2009	1,145	-16,18
2010	1,322	15,46
2011	1,317	-0,38
2012	1,31	-0,53
2013	1,316	0,46
2014	1,322	0,46
2015	1,325	0,23
2016	1,331	0,45
2017	1,341	0,75

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa Pada tahun 2010 kembali terjadi peningkatan nilai Indeks Entropi Theil yaitu sebesar 15,46%. Hal ini menunjukkan ketimpangan pembangunan di Kota Langsa mengalami peningkatan atau semakin tinggi ketidakmerataan pendapatan di wilayah tersebut. Nilai Indeks Entropy Theil kembali mengalami penurunan selama tahun 2011 sebesar 0,38% dan tahun 2012 0,53%. Namun demikian, selama tahun 2013-2017, nilai Indeks Enropi Theil terus mengalami peningkatan yang artinya pada Kota Langsa ketidakmerataan pendapaan semakin tinggi dan ketimpangan pembangunan berada dalam kondisi yang semakin timpang. Nilai Indeks Entropi Theil pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,341 atau meningkat sebesar 0,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketimpangan pembangunan yang diukur dengan Indeks Entropi Theil di Kota Langsa dengan tingkat ketimpangan terendah yaitu pada tahun 2009 sebesar 1,145.

Ketimpangan Pembangunan antara Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.

Ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan perbandingan tingkat ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa. Dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu tahun 2008-2017, ketimpangan

pembangunan antar wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa yang diukur dengan Indeks Entropi Theil menunjukkan besarnya nilai Indeks Entropi Theil pada Kabupaten Aceh Timur lebih mendekati angka 0 dibandingkan dengan Kota Langsa yang jauh dari angka 0, bahkan melebihi angka 1. Hal ini menunjukkan, ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur lebih rendah dibandingkan dengan Kota Langsa. Dengan kata lain, tingkat kemerataan pendapatan di Kabupaten Aceh Timur lebih merata dibandingkan dengan Kota Langsa.

Tabel 6. Ketimpangan Pembangunan antara Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa Tahun 2008 - 2017

Tahun	Indek Entropi Theil	
	Kabupaten Aceh Timur	Kota Langsa
2008	0,738	1,366
2009	0,570	1,145
2010	0,749	1,322
2011	0,754	1,317
2012	0,749	1,310
2013	0,757	1,316
2014	0,742	1,322
2015	0,745	1,325
2016	0,742	1,331
2017	0,739	1,341
Rata-Rata	**0,729**	**1,310**

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Entropi Theil, secara rata-rata nilai Indeks Entropi Theil Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2008-2017 yaitu sebesar 0,729. Sedangkan nilai Indeks Entropi Theil Kota Langsa selama tahun 2008-2017 secara rata-rata yaitu sebesar 1,310. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki pendapatan perkapita lebih besar ternyata belum tentu memiliki tingkat pembangunan wilayah yang baik atau semakin merata pendapatannya. Hasil ini dapat dilihat dimana Kabupaten Aceh Timur tingkat ketimpangannya lebih merata dibandingkan Kota Langsa meskipun pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Timur lebih kecil dibandingkan dengan Kota Langsa. Namun demikian, Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa masih jauh dari kata baik dari sisi pembangunan yang dibuktikan dengan nilai Indeks Entropi Theil yang nilainya masih jauh dari angka 0. Hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten/Kota (Andiny dan Pipit, 2017)

Selain itu, pengelolaan tingkat kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, lancarnya mobilitas barang dan jasa dan lain sebagainya dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maidar, Masbar dan Nasir (2017) dimana dari hasil penelitian menggambarkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang memiliki pendapatan perkapita lebih besar ternyata pendapatan perkapitanya masih belum merata.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Iswanto (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan di Kabupaten/Kota. Dalam hal ini perlu dilakukan pembangunan sektor-sektor potensial yang telah menjadi sektor basis di masing-masing daerah, yang dapat dikembangkan dengan inovasi dan teknologi.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulansebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Entropi Theil, secara rata-rata nilai Indeks Entropi Theil Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2008-2017 yaitu sebesar 0,729.
2. Nilai Indeks Entropi Theil Kota Langsa selama tahun 2008-2017 secara rata-rata yaitu sebesar 1,310.
3. Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa masih jauh dari kata baik dari sisi pembangunan yang dibuktikan dengan nilai Indeks Entropi Theil yang nilainya masih jauh dari angka 0. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor lain

seperti meningkatnya jumlah penduduk namun lapangan usaha yang tersedia masih kurang memadai, sehingga rendahnya angka pendapatan masyarakat akan mempengaruhi ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, pengelolaan tingkat kandungan sumber daya alam, kondisi demografis, lancarnya mobilitas barang dan jasa dan lain sebagainya dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa.

6. REFERENSI

Andiny, Puti dan Pipit Mandasari. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. **JENSI Universitas Samudra**. Vol. 1, No. 2, Hal: 196-210. https://ejurnalunsam.id

Arsyad, Lincolin. 2008. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2015. http:// bps.go.id

Hermawati, Lisa dan Misnalia. 2017. Analisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015. **Kolegial**. Vol.3, No.2, Hal:142-156

Iswanto, Denny. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antara Kabupaten/ Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. **Signifikan**. Vol.4, No.1, Hal:41-66.

Jhinghan, ML. 2007. **Ekonomi Pembangunan. Teori dan Kebijakan**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. **Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. 2009. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**. Jakarta, Erlangga.

Mahardiki, Doni dan Santoso, Rokhedi Priyo. 2013. Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi antar Provinsi di Indonesia. **JEJAK**. Vol.6, No.2, Hal:179-193.

Maidar, Rosti, Raja Masbar dan Muhammad Nasir. 2017. Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Aceh Periode 2002-2015. **Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia,** Vol. 4 No.1,Hal:23-34.

Mantra, Ida bagus. 2009. **Demografi Umum**. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Myrdal. 1997. **Economic Theory dan Under Development in Region**. London: Matheun.

Rusli, Ghalib. 2001. **Ekonomi Regional**. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Sugiyono. 2014. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2006. **Mikro Ekonomi Teori Pengantar**. Jakarta Raja Grafindo Persada.

Sjafrizal. 2008. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**. Jakarta: Prisma

Tarigan, Robinson. 2007. **Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi**. Jakarta: Bumi Aksara

Todaro, M.P. 2006. **Pembangunan Ekonomi**. Jakarta: Erlangga.

Yusuf, Yusbar dan Ekwarso, Hendro. 2017. Analisis Ketimpangan Wilayah Berdasarkan PDRB dan PAD Antara Riau Daratan dengan Riau Pesisir. **Jurnal Fekon**. Vol.4, No.1. Hal: 570-584.